

DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI

Ni Putu Priska Hendra Puspita ¹
Surya Dewi Rustariyuni ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: priskahendrap@gmail.com

ABSTRAK

Wilayah SARBAGITA yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional menjadi strategi pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diharapkan membuat pertumbuhan menjadi lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah untuk meminimalisir kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM dan PMA secara langsung terhadap TPT dan kemiskinan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali. Untuk mengetahui peran TPT dalam memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM dan PMA terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap TPT. UMK dan PMA berpengaruh positif signifikan terhadap TPT sedangkan IPM berpengaruh positif signifikan terhadap TPT pada wilayah SARBAGITA Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi, IPM dan PMA berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. UMK dan TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada wilayah SARBAGITA Provinsi Bali. TPT tidak memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM dan PMA terhadap kemiskinan pada wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

Kata kunci: *Pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan*

ABSTRACT

The SARBAGITA region which functions as a National Activity Center is a strategy for developing service systems for urban centers and centers of economic growth. It is hoped that growth will become more competitive and more effective in developing regions to minimize poverty. This study aims to analyze the effect of economic growth, MSEs, HDI and PMA directly on TPT and poverty in the SARBAGITA region of Bali Province. To determine the role of TPT in mediating the effect of economic growth, MSEs, HDI and PMA on poverty in the SARBAGITA region of Bali Province. The analysis technique used in this study is path analysis. The results showed that economic growth had no effect on TPT. UMK and PMA have a significant positive effect on TPT while HDI has a significant positive effect on TPT in the SARBAGITA region of Bali Province. Economic growth, HDI and PMA have a significant negative effect on poverty. UMK and TPT did not have a significant effect on poverty in the SARBAGITA region of the Province of Bali. TPT does not mediate the influence of economic growth, MSEs, HDI and PMA on poverty in the SARBAGITA region of Bali Province.

Keywords: *Economic growth, unemployment and poverty*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan dapat ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah serta antar sektor. Tujuan utama dari suatu pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus dapat menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2004:87). Dapat dikatakan bahwa prioritas dari keberhasilan suatu pembangunan adalah mengentaskan kemiskinan.

Timbulnya kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain, seperti tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan lingkungan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan (Marini, 2016). Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Hubungan antara pengangguran dan partisipasi angkatan kerja merupakan perhatian penting di bidang ekonomi tenaga kerja dan ekonomi pembangunan (Ozerkek, 2013). Pengurangan kemiskinan adalah tujuan penting dari kebijakan publik nasional dan perjanjian internasional (Santos dan Pablo, 2018).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu kesepakatan dari negara-negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia yang merupakan bagian dari

anggota PBB, tentunya ikut berkomitmen untuk mengatasi persoalan-persoalan di dunia seiring dengan deklarasi SDGs. Indonesia juga dituntut untuk ikut serta mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut. Tujuan pertama dalam deklarasi SDGs adalah tanpa kemiskinan. Tanpa kemiskinan yang dimaksud yaitu pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Menurut Michael dan Cristopher (2006) kemiskinan dilihat berdasarkan pendapatan atau pengeluaran yang menekankan pada ukuran-ukuran berbasis kesejahteraan.

Masalah kemiskinan belum dapat teratasi secara optimal juga diakibatkan karena faktor penyebab kemiskinan yang beragam dan kompleks. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan bukan hanya faktor ekonomi saja, dengan melihat dan mengamati faktor kemiskinan maka dapat diketahui cara untuk meminimalisir kemiskinan tersebut. Beberapa diantaranya seperti, penanaman modal asing yang masuk, pengangguran, dan modal manusia (dapat dilihat dari nilai IPM). Menurut Resosudarmo (2018), berbagai program efektif untuk meningkatkan modal manusia dan inovasi sangat penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Definisi dan pengukuran kemiskinan, salah satu dimensi kunci dari tujuan pembangunan milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tujuan pembangunan keberlanjutan yang lebih baru (Kolk et al, 2018). Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029, pada pasal 9 ayat 2 disebutkan mengenai strategi pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis yang mencakup sistem perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (SARBAGITA) yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Sebagai daerah PKN, kemiskinan yang terjadi di wilayah SARBAGITA tergolong tinggi. Selain tujuan pertama SDGs untuk mengentaskan kemiskinan, terdapat salah satu yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan dari suatu negara adalah tujuan kedelapan dari SDGs yaitu, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, terciptanya lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua orang (Ratha dan Rustariyuni, 2018).

Menurut Seran (2017), faktor penyebab timbulnya pengangguran diantaranya yaitu, pertama, rendahnya tingkat upah yang berlaku. Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai untuk bekerja (Chalid dan Yusbar, 2014). Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar, Ida Bagus Subrata kepada Tribun Bali, tidak dipungkiri mengenai permasalahan kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, tapi yang perlu dicatat ini karena tingginya angka urbanisasi di Kota Denpasar. Penduduk yang datang ke Kota Denpasar tidak semua dibekali pengetahuan dan keterampilan (bali.tribunnews.com).

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tabanan (Disnakertrans), Tjokorda Alit Juli kepada Tribun Bali menyatakan bahwa, untuk dapat menyerap pencari kerja itu, selain bursa kerja online pihaknya juga melakukan paket pelatihan di mana untuk tahun 2016 ini mendapatkan bantuan pelatihan dari pusat sebanyak 27 paket. Dari 27 paket tersebut, lima paketnya sudah berjalan antara lain, paket spa, tata rias, teknologi pendingin, otomotif dan paket menjahit. Selain mendapatkan skill para peserta juga diikuti dalam

BPJS Ketenagakerjaan agar menjamin keselamatannya selama mengikuti pelatihan, ketika akan berangkat dan pulang dari tempat pelatihan (bali.tribunnews.com).

Pada tahun 2017 Kabupaten Badung menempati peringkat TPT terendah yaitu sebesar 0,48 persen di wilayah SARBAGITA. Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, juga memiliki program pelatihan tenaga kerja sesuai kompetensi dan minat masyarakat, serta membuka bursa kerja (job fair) untuk mengatasi pengangguran di daerah itu. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Ida Bagus Oka Dirga, dalam menekan tingkat pengangguran, pemerintah Kabupaten Badung memiliki program pelatihan mekanik sepeda motor, pelatihan terapis SPA, dan pelatihan teknisi. Program ini, menjadi prioritas dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), sehingga program ini betul-betul menjadikan solusi untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Badung.

Para peserta yang telah mengikuti pelatihan ketenagakerjaan selama tiga hingga empat bulan sudah siap bekerja sesuai kompetensinya. Pemerintah Kabupaten Badung juga bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam upaya membantu permodalan untuk para peserta yang telah mengikuti pelatihan ini, dalam pengelolaan usaha para peserta pelatihan ini, pemerintah daerah juga tetap memberikan pendampingan agar usaha mereka terus berkembang. Untuk berbagai program yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini, pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan Rp 5 miliar untuk merealisasi program PPNSB (bali.antaranews.com).

Menurut Ogbeide, et al (2015) menyatakan dalam penelitiannya yaitu, tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator yang paling menonjol tentang seberapa baik kinerja ekonomi karena kesulitan yang dirasakan untuk mencari pekerjaan, terutama selama periode resesi. Menurut Adipuryanti dan Sudibia (2015), menyatakan bahwa, masalah ketenagakerjaan merupakan fenomena yang masih perlu diperhatikan di provinsi Bali, pasar tenaga kerja di Provinsi Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu kondisi utama dalam kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan adanya peranan pemerintah daerah memanfaatkan semua sumber daya secara optimal (Fajrii dkk, 2016). Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan adanya penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan atau disebut dengan *cateris paribus*, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Romi, 2018).

Menurut Suartha dan Yasa (2017), pertumbuhan ekonomi akan menciptakan multiplier effect terhadap sendi-sendi kehidupan, seperti lingkungan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Maqbool, et al (2013) menyatakan bahwa, produk domestik bruto (PDB) merupakan faktor penentu pengangguran yang signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, akan mengakibatkan bergairahnya aktivitas ekonomi serta semakin terbukanya kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan dapat menyebabkan ketimpangan kesejahteraan penduduk. Orang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin.

Kemiskinan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat sehingga menempatkannya pada kelompok miskin dan akan mempersempit kesempatan mengenyam pendidikan yang tinggi. Penduduk yang tidak dapat mengenyam pendidikan, akan sulit untuk terserap di pasar kerja, tidak jarang pula penduduk yang tidak mengenyam pendidikan diberikan upah di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Upah minimum telah menjadi papan penting kebijakan tenaga kerja pemerintah Indonesia (Suryadi et al, 2003). Menurut Sarah (2017), upah minimum adalah bidang kebijakan yang kontroversial yang penting untuk pekerjaan, pendapatan, dan insentif untuk memperoleh keterampilan baru. Ekonomi dihuni oleh dua jenis individu yaitu miskin dan kaya. Hanya individu kaya yang

memiliki akses ke aset yang memungkinkan mereka mentransfer kekayaan lintas periode. Orang miskin diberkati hanya dengan kerja. Pengaturan ini menyiratkan bahwa pendapatan dan konsumsi orang miskin hanya bergantung pada tingkat upah riil (Loayza dan Raddatz, 2010).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 mengenai pengupahan disebutkan bahwa, kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh, dari hasil pekerjaannya tersebut sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar. Upah yang diberikan ternyata secara riil nilainya sangat rendah meskipun secara nominal angkanya mungkin relatif cukup tinggi. Secara tidak langsung membuat para pekerja berada dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang semakin hari mengalami fluktuasi harga yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja diikuti dengan banyaknya penduduk yang memperoleh pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Penurunan masyarakat miskin harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan, karena kemiskinan menyangkut banyak aspek serta berkaitan dengan pendapatan yang rendah maka Romi (2018) menjelaskan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin. Solihin dan Sukartini (2014) mengungkapkan bahwa teori ekonomi neoklasik tentang penawaran tenaga kerja memprediksikan bahwa penawaran tenaga kerja seharusnya meningkat, jika ada peningkatan upah yang bersifat sementara. Dalam hubungan kerja atau lebih populer dengan istilah hubungan industrial, terdapat dua pihak yang memiliki hubungan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Pihak pertama adalah pemilik modal atau pengusaha yang bertindak sebagai pemberi upah, sedangkan di sisi yang lain, buruh atau pekerja berada pada posisi sebagai pihak penerima upah (Kurniawan dan Eny, 2017).

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pengangguran dan penduduk miskin. Pengangguran diakibatkan oleh kualitas SDM yang rendah, sehingga tersisih pada kompetisi pasar yang modern saat ini. Kualitas SDM dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan dapat menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Aprilianti dkk, (2016) menjelaskan bahwa secara parsial IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Sucitrawati (2013) menjelaskan investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penting untuk menentukan strategi investasi yang akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan dapat mengentaskan kemiskinan. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Tingkat investasi dalam hal ini adalah penanaman modal asing (PMA). Sukirno (2002:367) menyatakan PMA yang tinggi tentu akan menjadi peluang dalam membuka seluas-luasnya lapangan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan PMA yang berorientasi terhadap kegiatan padat karya tentu akan sangat bermanfaat dan dapat menyerap tenaga kerja, namun bila PMA yang lebih berorientasi padat modal tentu akan sangat sedikit dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga sulit mengurangi tingkat pengangguran dan penduduk yang menganggur akan terjebak pada lingkaran kemiskinan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM dan PMA secara langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM, PMA, dan tingkat pengangguran terbuka secara langsung terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui peran tingkat pengangguran terbuka dalam memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM dan PMA terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

METODE PENULISAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Rancangan penelitian kuantitatif disebut sebagai penelitian yang menggunakan paradigma positivism, yaitu dari teori-teori dan temuan orang lain kemudian disusun hipotesis sesuai masalah penelitian yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2014:13). Penelitian ini dilakukan di wilayah SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). Alasan memilih wilayah ini, karena terdapat dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029, pada pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan mengenai strategi pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis yang mencakup sistem perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (SARBAGITA) yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Objek penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM, dan PMA terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali melalui Tingkat Pengangguran Terbuka. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM, PMA, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini yaitu pedoman dalam wawancara mendalam dengan beberapa penduduk yang tergolong miskin di wilayah SARBAGITA. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi mengenai pengangguran dan kemiskinan di wilayah SARBAGITA. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi terkait yakni, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali melalui publikasi Provinsi Bali Dalam Angka pada berbagai terbitan meliputi data pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM, PMA, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.

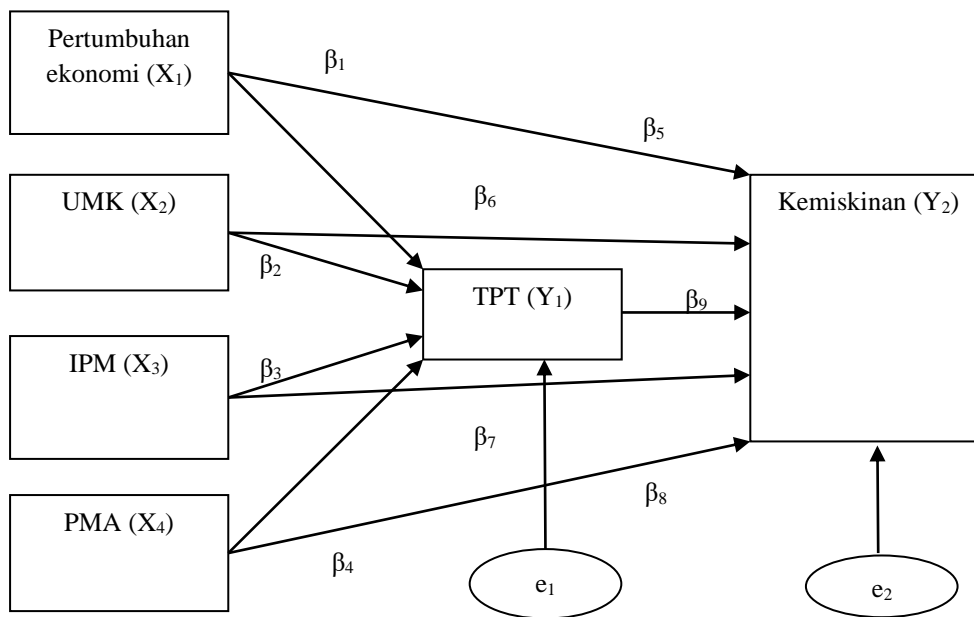
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi non perilaku dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan bantuan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 21. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang berjenjang berdasarkan teori (Utama, 2016:159). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening. Dalam penelitian ini didapatkan persamaan model struktural sebagai berikut

Struktur I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

Struktur II

$$Y_2 = \beta_5 X_1 + \beta_6 X_2 + \beta_7 X_3 + \beta_8 X_4 + \beta_9 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$



Keterangan:

- X₁ = Pertumbuhan ekonomi (persen)
- X₂ = UMK (rupiah)
- X₃ = IPM (Indeks Pembangunan Manusia) (persen)
- X₄ = PMA (Penanaman Modal Asing) (rupiah)
- Y₁ = TPT (Tingkat pengangguran terbuka) (persen)
- Y₂ = Kemiskinan (jiwa)
- β₁....β₉ = Koefisien jalur untuk masing-masing variabel
- e₁, e₂ = Kesalahan Residual (error)

Gambar 2 Model Analisis Jalur Penelitian Determinan Tingkat Pengangguran Dan Kemiskinan Di Wilayah SARBAGITA Provinsi Bali

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat menyebabkan bertambahnya kebutuhan ekonomi setiap orang. Semakin meningkat pertumbuhan penduduk maka semakin sedikit lapangan pekerjaan yang ada sehingga jumlah pengangguran bertambah. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk terhadap perekonomian, individu dan masyarakat.

Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai sehingga menimbulkan kemiskinan. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Sesuai dengan penelitian terdahulu dimana Senet dan Yuliarmi (2014), Chowdhury et all (2014), Wardiansyah (2016), Putri (2015), Adawiyah (2016) menemukan hasil dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Syaifullah dan Nazaruddin (2017), Aprilianti dkk (2016), dan Setiyawati dkk (2007) menemukan hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda dalam penelitiannya seperti Sirait dan Marhaeni (2013), Putri (2016) serta Utami dkk, (2016) menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Zahroh (2017) menemukan hasil penelitian pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Romi dan Etik (2018), Latipah dkk (2017) dan Fadlillah (2016) menemukan hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Upah diartikan sebagai imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja akibat sumbangannya dalam menghasilkan barang dan jasa. Sebagian besar orang mengharapkan upah yang diterima dapat mencukupi kebutuhan dan sesuai dengan harapan ekonomis. Peningkatan upah dikaitkan dengan peningkatan pengangguran karena upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, karena naiknya upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran.

Dari pihak tenaga kerja upah adalah imbalan yang seharusnya diterima akibat balas jasa dari waktu dan tenaga yang digunakan, akibat penambahan upah minimum dapat menarik angkatan kerja untuk mau bekerja dan mencari pekerjaan. Sama halnya dengan pengangguran, upah juga memiliki kaitan erat dengan kemiskinan. Upah atau pendapatan

menjadi tolak ukur seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian Ratha dan Rustariyuni (2018), Sirait dan Marhaeni (2013), Sucitrawati dan Sudarsana (2013), Wijayanti dan Karmini (2014), Wardiansyah (2016), Zahroh (2017), Putri (2016), Putri (2015) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Romi dan Etik (2018), serta Marini (2016), dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa, upah minimum mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. Terdapat beberapa penelitian yang berbeda dimana menurut Kurniawan dan Mochamad (2014), upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Mada dan Khusnul (2015) dalam penelitiannya menemukan terdapat hubungan positif antara upah dengan jumlah pengangguran. Menurut Baah-Boateng (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa, upah menyebabkan pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh Rustariyuni et all (2018) menjelaskan UMK dalam jangka pendek berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka sedangkan dalam jangka panjang UMK berpengaruh positif terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya sekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan.

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran dapat mempengaruhi nilai IPM. Begitu juga dengan kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan oleh karena itu tingkat kemiskinan

dapat mempengaruhi nilai IPM. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chalid (2014) menyatakan IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Nurcholis (2014) menyatakan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, Latifah dkk (2017), dalam penelitiannya disebutkan bahwa ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka namun tidak berpengaruh signifikan. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin, tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Akan tetapi terdapat pengaruh signifikan antara IPM terhadap jumlah penduduk miskin melalui tingkat pengangguran terbuka. Aprilianti dkk (2016) menemukan bahwa IPM mempunyai tanda negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tingginya laju investasi seharusnya dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan Kurniawan (2014) mengenai jumlah pengangguran menemukan bahwa, investasi berpengaruh secara negatif terhadap pengangguran, dimana investasi meningkat satu satuan, maka tingkat pengangguran akan menurun sebesar satu satuan. Prayuda dan Urmila (2015) juga menemukan hal yang sama dalam penelitiannya, bahwa PMA secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Endrayani dan Urmila (2016) menemukan bahwa secara langsung investasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Secara tidak langsung, investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

Pengangguran terbuka merupakan, pengangguran yang tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja yang berdampak terhadap kemiskinan karena masyarakat tidak mendapatkan pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paramita dan Purbadharmaja (2015), Putra dan Sudarsana Arka (2018) dan Suadnyani dan Darsana (2018) menjelaskan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk terhadap perekonomian, seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai. Hasil penelitian berbeda didapatkan oleh Yoga dan Yasa (2018), Buchori (2017) dan Probosiwi (2016) menjelaskan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan penganggur merupakan kelompok terdidik yang sedang mencari pekerjaan. Kelompok pengangguran ini tidak serta merta merupakan kelompok miskin karena masih memiliki anggota keluarga lain yang menyokong kehidupan mereka atau bahkan berasal dari keluarga tidak miskin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, seperti nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut.

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	32	5.38	7.64	6.5213	.54414
UMK	32	854500.00	2299311.00	1510445.9375	425235.07466
IPM	32	70.68	83.01	76.5156	3.72780
PMA	32	2360000.00	4899094000.00	849203312.5000	1307808712.31013
TPT	32	.34	6.57	2.0394	1.27699
Kemiskinan	32	12510.00	31500.00	19918.7500	4827.91129
Valid N (listwise)	32				

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 5,38 dan nilai maksimum sebesar 7,64 dengan rata-rata sebesar 6,5213 dan standar deviasi sebesar 0,54414. Variabel UMK memiliki nilai minimum yaitu 8854.000,00 dan nilai maksimum sebesar 2.299.311,00 dengan nilai rata-rata sebesar 1.510.445,9375 dan standar deviasi sebesar 425.235,07466. Variabel IPM memiliki nilai minimum yaitu 70,68 dan nilai maksimum sebesar 83,01 dengan nilai rata-rata sebesar 76,5156 dan standar deviasi sebesar 3,72780. Variabel PMA memiliki nilai minimum yaitu 2.360.000,00 dan nilai maksimum sebesar 4.899.094.000,00 dengan nilai rata-rata sebesar 1.510.445,9375 dan standar deviasi sebesar 425.235,07466. Variabel TPT memiliki nilai minimum yaitu 0,34 dan nilai maksimum sebesar 6,57 dengan nilai rata-rata sebesar 2,0394 dan standar deviasi sebesar 1,27699. Serta pada variabel kemiskinan memiliki nilai minimum yaitu 12.510,00 dan nilai maksimum sebesar 31.500,00 dengan nilai rata-rata sebesar 19.918,7500 dan standar deviasi sebesar 4.827,91129.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM, dan PMA terhadap TPT serta Kemiskinan di wilayah SARBAGITA. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan metode regresi sederhana (*Ordinary Least Square - OLS*) dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) terhadap model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

Persamaan I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_1 \dots\dots\dots(3)$$

Persamaan II

$$Y_2 = \beta_5 X_1 + \beta_6 X_2 + \beta_7 X_3 + \beta_8 X_4 + \beta_9 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

- X₁ = Pertumbuhan ekonomi (persen)
- X₂ = UMK (rupiah)
- X₃ = IPM (Indeks Pembangunan Manusia) (persen)
- X₄ = PMA (Penanaman Modal Asing) (rupiah)
- Y₁ = TPT (Tingkat pengangguran terbuka) (persen)
- Y₂ = Kemiskinan (jiwa)
- β₁...β₉ = Koefisien jalur untuk masing-masing variabel
- e₁, e₂ = Kesalahan Residual (*error*)

1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, UMK, IPM dan PMA Terhadap TPT

Pengujian persamaan 1 dilakukan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM dan PMA terhadap TPT secara langsung yang dilakukan dengan program SPSS maka hasil persamaan regresi disajikan sebagai berikut.

$$\hat{Y}_1 = -0.273X_1 - 0,719X_2 + 0,818X_3 - 0,398X_4 + e_1 \dots\dots\dots(5)$$

Persamaan 1 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar -0.273 dan nilai signifikansi 0.119 > 0,05 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPT. Variabel UMK dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar -0.719 dan nilai signifikansi 0.001 < 0,05 menunjukkan bahwa UMK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Variabel IPM dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0.818 dan nilai signifikansi 0.000 < 0,05 menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap TPT. Variabel PMA dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar -0.398 dan nilai signifikansi 0.008 < 0,05 menunjukkan bahwa PMA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT.

2) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, UMK, IPM, PMA dan TPT terhadap Kemiskinan

Pengujian persamaan 2 dilakukan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM, PMA dan TPT terhadap kemiskinan secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS maka hasil persamaan regresi disajikan sebagai berikut.

$$\hat{Y}_2 = -0,407X_1 - 0,084X_2 - 0,453X_3 - 0,326X_4 + 0,070Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(6)$$

Hasil pengujian menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar -0.407 dan nilai signifikansi $0.007 < 0,05$ menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel UMK dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar -0.084 dan nilai signifikansi $0.656 > 0,05$ menunjukkan bahwa UMK memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Variabel IPM dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar -0.453 dan nilai signifikansi $0,026 < 0,05$ menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel PMA dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar -0.326 dan nilai signifikansi $0.014 < 0,05$ menunjukkan bahwa PMA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel TPT dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0.070 dan nilai signifikansi $0.642 > 0,05$ menunjukkan bahwa TPT memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Tabel 3. Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antar Variabel

Regresi	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	P.Value	Keterangan
X1 → Y1	-0.273	0.119	Tidak Signifikan
X2 → Y1	-0.719	0.001	Signifikan
X1 → Y2	0.818	0.000	Signifikan
X2 → Y2	-0.398	0.008	Signifikan
Y1 → Y2	-0.407	0.007	Signifikan
Y1 → Y2	-0.084	0.656	Tidak Signifikan
Y1 → Y2	-0.453	0.026	Signifikan
Y1 → Y2	-0.326	0.014	Signifikan
Y1 → Y2	0.070	0.645	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Nilai Kekeliruan Taksiran Standar

Mengetahui nilai e_1 yang menunjukkan jumlah variance variabel TPT yang tidak dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM dan PMA dihitung dengan menggunakan rumus :

$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2}$$
$$e_1 = \sqrt{1 - 0,450} = 0,741$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan variance variabel kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM, PMA dan TPT, maka dihitung menggunakan rumus:

$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2}$$
$$e_2 = \sqrt{1 - 0,668} = 0,576$$

Pemeriksaan Validitas Model

Memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut :

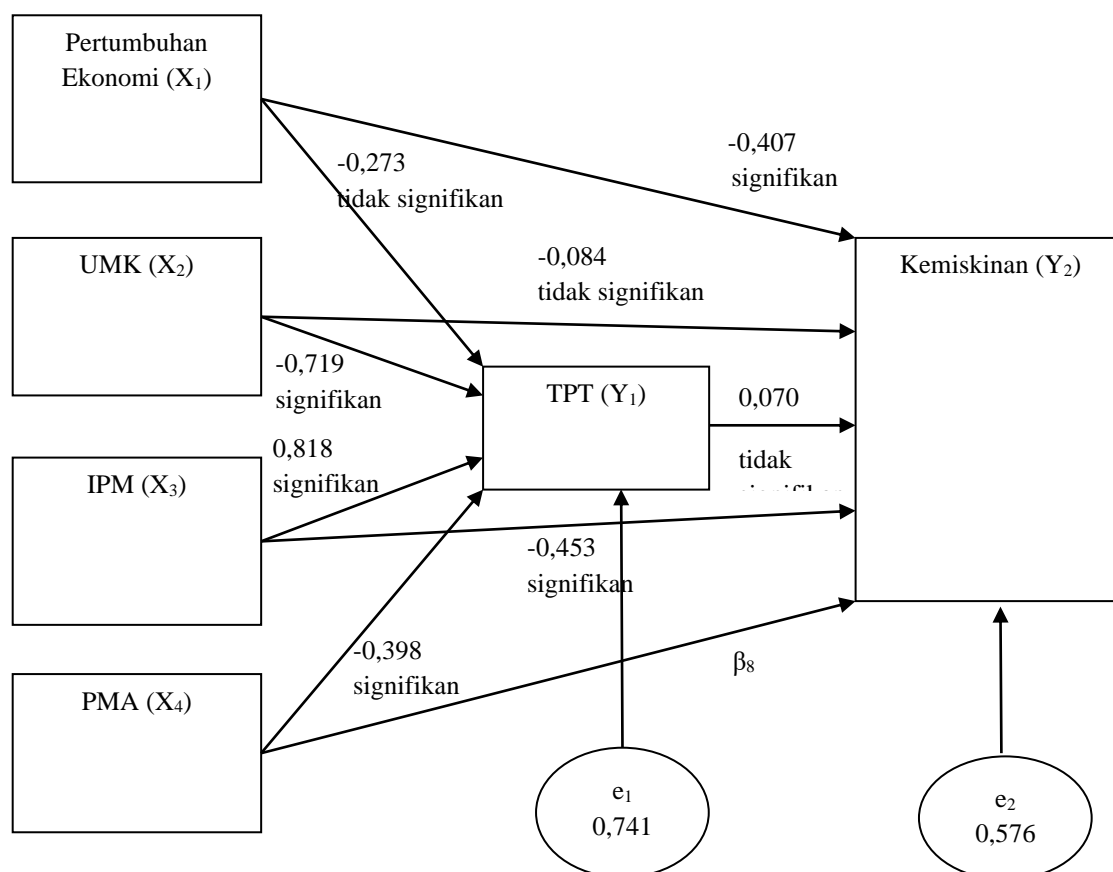
$$R^2_m = 1 - (Pe_1)^2 - (Pe_2)^2$$
$$= 1 - (0,741)^2 - (0,576)^2$$
$$= 0,817$$

Keterangan :

R^2_m : Koefisien determinasi total

e_1, e_2 : Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 0,817 atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 81,7 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 18,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.



Gambar 2 Diagram Hasil Analisis Jalur

Pengujian Hasil Hipotesis

Pengujian Pengaruh Langsung

- 1) Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi dengan nilai $t_{hitung} = -1,611 > t_{tabel} -2,052$ dan nilai signifikansi sebesar $0,119 > \alpha 0,05$ ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya pertumbuhan ekonomi (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y_1). Hubungan tidak signifikan yang didapat dalam hasil penelitian ini berarti jika ada peningkatan pertumbuhan ekonomi maka tidak akan terlalu berpengaruh dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunani *et all* (2018) dan Fatimah (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah

SARBAGITA belum mampu sepenuhnya menyerap tenaga kerja yang terus bertambah di wilayah SARBAGITA akibat urbanisasi yang dilakukan masyarakat desa menuju kota. Perbandingan yang kurang seimbang antara penambahan kesempatan kerja dengan jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu terserap dalam lapangan pekerjaan dan menambah angka pengangguran. Seharusnya setiap perubahan pada tingkat pengangguran terkait dengan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya peningkatan kapasitas produksi yang akan berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja.

2) Pengaruh langsung UMK terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

UMK dengan nilai $t_{hitung} = -3,711 < t_{tabel} -2,052$ dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < \alpha$ 0,05 ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya UMK (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y_1). Hubungan negatif dan signifikan yang didapat dalam hasil penelitian ini berarti jika terjadi peningkatan UMK maka akan berpengaruh dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratha dan Rustariyuni (2018) Sirait dan Marhaeni (2013), Sucitrawati dan Sudarsana (2013), Wijayanti dan Karmini (2014), Wardiansyah (2016), Zahroh (2017), Putri (2016), Putri (2015) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan dari sisi tenaga kerja dimana upah adalah imbalan yang seharusnya diterima akibat balas jasa dari waktu dan tenaga yang digunakan, sehingga penambahan upah minimum dapat menarik angkatan kerja untuk mau bekerja dan mencari pekerjaan.

3) Pengaruh langsung IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

IPM dengan nilai $t_{hitung} = 4,322 > t_{tabel} -2,052$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya IPM (X_3) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y_1). Hubungan positif dan signifikan yang didapat dalam hasil penelitian ini berarti jika terjadi peningkatan IPM maka akan berpengaruh dalam menambah tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurcholis (2014) menjelaskan dalam penelitiannya IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dalam meningkatkan IPM terdapat tiga komponen dasar. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*living standards*). Dalam penelitian ini pengaruh positif dan signifikan IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka pada wilayah SARBAGITA disebabkan oleh banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang terdidik (*knowledge*) masih belum sepenuhnya terserap dalam kesempatan kerja sehingga membuat angka pengangguran lebih lambat turun dibanding peningkatan angka IPM. Tidak terserapnya SDM ini disebabkan karena SDM terlalu memilih pekerjaan atau sedang menunggu pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Penyebab lain juga dapat dikarenakan adanya persaingan yang terjadi antara SDM yang ada di wilayah SARBAGITA dengan SDM pendatang dari luar wilayah SARBAGITA membuat pasar tenaga kerja menjadi padat dan persaingan semakin ketat sedangkan pertumbuhan lapangan kerja yang lambat.

4) Pengaruh langsung PMA terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

PMA dengan nilai $t_{hitung} = -2,848 < t_{tabel} 2,052$ dan nilai signifikansi $0,008 < \alpha 0,05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya PMA (X_4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y_1). Hubungan negatif dan signifikan yang didapat

dalam hasil penelitian ini berarti jika terjadi peningkatan PMA maka akan berpengaruh dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayuda dan Urmila (2015) dan Kurniawan (2014) menjelaskan dalam penelitiannya PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Investasi merupakan penambahan faktor- faktor produksi, yang mana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan begitu, perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, membuat partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat dan mengurangi pengangguran.

Pada wilayah SARBAGITA investasi PMA mayoritas berada pada sektor padat karya untuk pemenuhan kebutuhan sarana pariwisata seperti pembangunan infrastruktur penyediaan akomodasi hotel dan makan minum restoran serta penunjang pariwisata lainnya sehingga dalam menjalankan usahanya mampu menyerap tenaga kerja manusia karena pada industri pariwisata yang dijual adalah pelayanan jasa dan tidak hanya mementingkan teknologi saja.

5) Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

Pertumbuhan ekonomi dengan nilai $t_{hitung} = -2,596 < t_{tabel} -2,052$ dan nilai signifikansi sebesar $0,007 < \alpha 0,05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pertumbuhan ekonomi (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y_2). Hubungan negatif dan signifikan yang didapat dalam hasil penelitian ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada wilayah SARBAGITA maka akan berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga dan Murjana Yasa (2018), Purnama (2017) dan Aprilianti *dkk* (2016) menemukan hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Adanya pengaruh negatif signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan ini

sesuai dengan teori Mankiw (1995:158) menjelaskan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan.

Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, hal tersebut membuat perusahaan menambah produksi barang dan jasa. Peningkatan upah yang di dapat oleh tenaga kerja dikarenakan meningkatkannya produksi barang dan jasa tersebut. Pendapatan yang meningkat membuat taraf hidup layak mereka meningkat dan terbebas dari kemiskinan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wongdesmiwati (2009), dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Menurunkan tingkat kemiskinan perlunya memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

6) Pengaruh langsung UMK terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

Pertumbuhan ekonomi dengan nilai $t_{hitung} = -0,451 > t_{tabel} 2,052$ dan nilai signifikansi sebesar $0,656 > \alpha 0,05$ ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya UMK (X_2) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y_2). Hubungan tidak signifikan yang didapat dalam hasil penelitian ini berarti penambahan upah minimum yang dilakukan pemerintah wilayah SARBAGITA maka tidak akan terlalu berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga dan Murjana Yasa (2018) dan Suwarno dan Mujiono (2013) menemukan hasil penelitian bahwa upah minimum mempunyai pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Ketika upah minimum meningkat maka kemiskinan akan meningkat, dikarenakan upah minimum yang tinggi membuat perusahaan tidak mampu membayar upah tenaga kerja, maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaganya, dari berkurangnya tenaga kerja tersebut berarti sebagian tenaga kerja sudah tidak bekerja lagi dan membuat hilangnya penghasilan mereka.

Hilangnya penghasilan mereka membuat kualitas hidup mereka berkurang dan menambah kemiskinan. Selain itu masih banyak perusahaan yang menerima karyawan atau

pegawai dengan sistem kontrak juga menjadi salah satu alasannya. Ketika upah minimum meningkat maka tidak akan berpengaruh terhadap kemiskinan, meskipun upah minimum meningkat tetapi dalam realitanya perusahaan masih saja memberi kontrak kerja dengan upah upah terhadap tenaga kerjanya dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan kejadian seperti ini meskipun upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah meningkat, maka tentu saja tidak akan mempengaruhi kemiskinan.

7) Pengaruh langsung IPM terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

IPM dengan nilai $t_{hitung} = -2,368 < t_{tabel} -2,052$ dan nilai signifikansi sebesar $0,026 < \alpha$ 0,05 ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya IPM (X_3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y_2). Hubungan negatif dan signifikan yang didapat dalam hasil penelitian ini berarti penambahan peningkatan IPM yang terjadi pada wilayah SARBAGITA sangat berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti *dkk* (2016) dan Sri (2010) menemukan hasil penelitian bahwa IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai IPM yang meningkat pada wilayah SARBAGITA menunjukkan capaian sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), serta tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

Hal ini karena wilayah SARBAGITA merupakan kawasan metropolitan yang terbilang maju dari berbagai aspek terutama aspek pendidikan (*knowledge*) dengan banyaknya institusi dan lembaga pendidikan yang berkualitas dan terakreditasi sehingga mampu menghasilkan SDM yang berkompeten sehingga terserap dalam pasar tenaga kerja dan berkontribusi mengurangi kemiskinan pada wilayah SARBAGITA. Pengembangan manusia yang dilakukan pemerintah wilayah SARBAGITA mampu memberikan efek dalam kehidupan manusia, dan pembangunan oleh manusia mampu berpartisipasi aktif dalam

mempengaruhi proses-proses yang membentuk kehidupan mereka untuk mencapai standar hidup layak (*living standards*) melewati garis kemiskinan.

8) Pengaruh langsung PMA terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

PMA dengan nilai $t_{hitung} = -2,629 < t_{tabel} -2,052$ dan nilai signifikansi sebesar $0,014 < \alpha$ 0,05 ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya PMA (X_4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y_2). Hubungan negatif dan signifikan yang didapat dalam hasil penelitian ini berarti jika terjadi peningkatan PMA maka akan berpengaruh dalam mengurangi jumlah kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustini (2017) dan Nizar dkk (2013) yang menjelaskan bahwa investasi asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Peran investasi asing pada wilayah SARBAGITA sangat besar, bersifat padat karya dalam menumbuhkan perekonomian di daerah sehingga *multiplier effect* dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat membuat tingkat kemiskinan berkurang.

9) Pengaruh langsung TPT terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

TPT dengan nilai $t_{hitung} = 0,471 < t_{tabel} 2,052$ dan nilai signifikansi sebesar $0,642 > \alpha$ 0,05 ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya TPT (Y_1) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y_2). Hubungan tidak signifikan yang didapat dalam hasil penelitian ini berarti jika terjadi penambahan jumlah pengangguran terbuka maka tidak terlalu berpengaruh dalam menambah jumlah kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga dan Murjana Yasa (2018), Buchori (2017) dan Probosiwi (2016) menjelaskan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Ketika pengangguran meningkat, maka tidak akan mempengaruhi kemiskinan. Mereka yang tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin ialah mereka yang bisa memenuhi kebutuhan dari orang yang bekerja dengan waktu yang normal. Penduduk yang sudah bermodal dari warisan yang dimilikinya, mereka masih memilih pekerjaan yang cocok untuk mereka, tanpa tergesa-gesa mencari

pekerjaan, karena tanpa bekerja mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka dari kekayaan warisan keluarganya tersebut. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Paramita dan Suresmiati (2012), dimana dalam penelitiannya di Provinsi Bali tidak terdapatnya pengaruh antara pengangguran terhadap kemiskinan. Menurut Yacoub (2012) kondisi ini dapat digambarkan dalam suatu rumah tangga yang terdiri dari beberapa anggota rumah tangga hanya satu orang yang bekerja dan memenuhi semua kebutuhan anggota rumah tangga tersebut.

Pengujian Pengaruh Tidak langsung

- 1) Pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA melalui TPT

Oleh karena z hitung sebesar $-0,451 < 1,96$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya TPT (Y_1) bukan sebagai variabel intervening pertumbuhan ekonomi (X_1) terhadap kemiskinan (Y_2) di wilayah SARBAGITA atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui TPT.

- 2) Pengaruh tidak langsung UMK terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA melalui TPT

Oleh karena z hitung sebesar $-0,470 < 1,96$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya TPT (Y_1) bukan sebagai variabel intervening UMK (X_2) terhadap kemiskinan (Y_2) di wilayah SARBAGITA atau dengan kata lain UMK tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui TPT.

- 3) Pengaruh tidak langsung IPM terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA melalui TPT

Oleh karena z hitung sebesar $0,467 < 1,96$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya TPT (Y_1) bukan sebagai variabel intervening IPM (X_3) terhadap kemiskinan (Y_2) di wilayah

SARBAGITA atau dengan kata lain IPM tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui TPT.

- 4) Pengaruh tidak langsung PMA terhadap kemiskinan di wilayah SARBAGITA melalui TPT

Oleh karena z hitung sebesar $-0,460 < 1,96$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya TPT (Y_1) bukan sebagai variabel intervening PMA (X_4) terhadap kemiskinan (Y_2) di wilayah SARBAGITA atau dengan kata lain PMA tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui TPT.

Tabel 4 Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Pertumbuhan Ekonomi, UMK, IPM, PMA, TPT dan Kemiskinan di Wilayah SARBAGITA

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y_1	
$X_1 \longrightarrow Y_1$	-0.273	-	-0.273
$X_2 \longrightarrow Y_1$	-0.719	-	-0.719
$X_3 \longrightarrow Y_1$	0.818	-	0.818
$X_4 \longrightarrow Y_1$	-0.398	-	-0.398
$X_1 \longrightarrow Y_2$	-0.407	-0.019	-0.426
$X_2 \longrightarrow Y_2$	-0.084	-0.050	-0.134
$X_3 \longrightarrow Y_2$	-0.453	0.057	-0.396
$X_4 \longrightarrow Y_2$	-0.326	-0.027	-0.353
$Y_1 \longrightarrow Y_2$	0.070	-	0.070

Sumber : Hasil Penelitian 2019

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 1) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Penanaman Modal Asing berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran

Terbuka pada wilayah SARBAGITA Provinsi Bali; 2) pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada wilayah SARBAGITA Provinsi Bali; dan 3) Tingkat Pengangguran Terbuka tidak memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia dan Penanaman Modal Asing terhadap kemiskinan pada wilayah SARBAGITA Provinsi Bali.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pemaparan simpulan di atas antara lain 1) pemerintah pada wilayah SARBAGITA dan pihak swasta diharapkan memfokuskan perhatian yang lebih pada struktur dan kualitas dari pertumbuhan ekonomi. Melalui pemetaan potensi masing-masing wilayah sesuai dengan potensi dan karakteristiknya, bekerjasama dan selektif dalam melakukan pembangunan dan investasi yang bersifat padat karya sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi diiringi dengan berkurangnya pengangguran dan kemiskinan; 2) pemerintah pusat dan wilayah SARBAGITA serta pihak swasta diharapkan melakukan sosialisasi kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan serta program-program yang mendukung dan membantu kegiatan kewirausahaan seperti membantu permodalan seseorang yang ingin berwirausaha melalui pemberian pinjaman modal usaha, izin usaha, pemasaran hasil produk usaha dan sebagainya sehingga masyarakat wilayah SARBAGITA terpacu untuk menjadi seorang wirausahawan; dan 3) masyarakat pada wilayah SARBAGITA yang berdasarkan data IPM setiap tahunnya mengalami peningkatan diharapkan dapat merubah pola pikir dari seorang “officer” menjadi seorang “owner”. Perubahan pola pikir ini pada akhirnya mampu menambah lapangan kerja membuat peningkatan IPM yang terjadi disertai juga dengan berkurangnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

REFERENSI

- Adawiyah, Rabiatul dan Chenny Seftarita. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Perbatasan Timur Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 1 (2), 348-357.
- Adipuryanti, Ni luh Putu Yuni, dan I Ketut Sudibia. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *PIRAMIDA-Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 11 (1), 20-28.
- Agustini, Yetty. 2017. Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6 (2), 97-119.
- Aprilianti, Rizki Amalia Nurul Imamah dan Nurul Iman. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, Ipm Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Timur Tahun 2011 – 2015. *e-Jurnal Ekonomi Pembangunan GLOBAL*. Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara, 2 (1), 81-93.
- Baah-Boateng, William. (2015). Unemployment in Ghana: a cross sectional analysis from demand and supply perspectives. *African Journal of Economic and Management Studies*. University of Ghana, 6 (4), 402-415.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Bali Dalam Angka 2008*. Denpasar: BPS Bali.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Provinsi Bali Dalam Angka 2017*. Denpasar: BPS Bali.
- Biswajit, Mandal and Arindam Mandal. (2015). A Note on How and Why Growth and Unemployment Go Hand in Hand in Developing Economies. *International Economic Journal*. Univesity at Albani-SUNY, er29 (4), 1-13.
- Chalid, Nursiah dan Yusbar. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 22 (2), 1-12.
- Chowdhury, Mohammad Shafiur Rahman, and Md. Tanjil Hossain. (2014) Determinants of Unemployment in Bangladesh: A Case Study. *Developing Country Studies*. Jatiya Kabi Kazy Nazrul Islam University, 4 (3), 16-20.

- Dewi, Nyoman Lilya Santika dan I Ketut Sutrisna. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 3 (3), 76-123.
- Eita, Joel Hinaunye and Johannes M. Ashipala. (2010). Determinants of Unemployment in Namibia. *International Journal of Business and Management*. Monash University, 5 (10), 92-104.
- Fajrii, Muhammad, Arman Delis, dan Yohanes Vyn Amzar. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 9 (2), 89-176.
- Fatimah. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Aceh. Malaysia. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. *Naskah Publikasi*.
- Kemi FA and Dayo BO. (2014). Unemployment And Economic Growth In Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Department of Economics. Ekiti State University, 5 (4), 1-8.
- Kolk, A., Miguel Rivera-Santos, and Carlos Rufin. (2018). Multinationals, International Business, And Poverty: A cross-disciplinary research overview and conceptual framework. *Journal of International Business Policy*. Univerdity of Amsterdam Business School, 1 (1), 92-115. <https://doi.org/10.1057/s42214-018-0004-1>
- Kurniawan, Aditya Barry dan Mochamad Affandi. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Investasi terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya, Malang, 2 (2), 1-8.
- Kurniawan, Septyono dan Eny Sulistyaningrum. (2017). Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 10 (2), 110-252.
- Latifah, N. & M. Y. Darsyah (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran per Kapita Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seminar Nasional Pendidikan, Sains dan Teknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Loayza, N.V., and Raddatz, C. (2010). The Composition Of Growth Matters For Poverty Alleviation. *Journal of Development Economic*. The World Bank United States, 93 (1), 137-151.
- Mada, Muhammad dan Khusnul Ashar. (2015). Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran Terdidik Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 15 (1), 50-76.

- Maqbool, Muhammad Shahid, Tahir Mahmood Abdul Sattar And M. N. Bhalli. (2013). Determinants Of Unemployment Empirical Evidences From Pakistan. *Pakistan Economic and Social Review*. University of Punjab 5 (2), 191-208.
- Marhaeni, A.A.I.N, dan Manuati Dewi. (2004). *Buku Ajar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Marini, Tety. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, 12 (1), 108-137.
- Michael R. Carter and Christopher B. Barrett. (2006). The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-based approach. *The Journal of development Studies*. University of Wisconsin USA, 42 (2), 178-199.
- Nizar, Chairul. 2013. Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Issn 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kual. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Nurcholis, Muhammad. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Muhammadiyah Malang, 12 (1), 46-54.
- Ogbeide, Frank Iyekoretin, Hillary Kanwanye, and Sunday Kadiri. (2015). The Determinants of Unemployment and the Question of Inclusive Growth in Nigeria: Do Resource Dependence, Government Expenditure and Financial Development Matter?. *Montenegrin Journal of Economics*. University of Benin Nigeria, 11 (2), 49-64.
- Okoye, A.C. (2017). Entrepreneurship Education: A Panacea For Graduate Unemployment In Nigeria. *Online journal of Arts, Management and Social Sciences*, Department of Sociology. University of Abuja, Abuja, Nigeria, 2 (1), 56-63.
- Ozerkek, Y. (2013). Unemployment and Labor Force: A Panel Cointegration Analysis for European Countries. *Applied Econometrics and International Development*. Faculty of Economics Marmara University, 13 (1), 67-76.
- Patera, I Made dan I Wayan Suardana. (2015). Model Hubungan Pariwisata, Kinerja Perekonomian dan Kemiskinan di Kabupaten Badung Bali. *Piramida. Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Udayana, 11 (2), 95-105.
- Prayuda, Mahanatha Giri dan Made Heny Urmila Dewi. (2015). Pengaruh Inflasi Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali Tahun 1994-2013. *E-Jurnal*

Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 5 (1), 69-95.

Probosiwi, Ratih. 2015. Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal PKS* , 4 (10), 1194-1218.

Purnama, Nadia Eka. 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Naskah Publikasi*.

Putri, Dwi Aprilia dan Waspodo Tjipto Subroto. (2016). Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 4 (3), 3-7.

Putri, Rizka Febiana. (2015). Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik. *Economic Development Analysis Journal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 4 (2), 176-181.

Ratha, Putu Widi Suryawan dan Surya Dewi Rustariyuni. (2018). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *The Journal Of Economics Development*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 7 (3), 261-284.

Resosudarmo, B. P., and Abdurrohman. (2018). Is Being Stuck with a Five Percent Growth Rate a New Normal for Indonesia ?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. The Australian National University, 54 (2), 141-164.

Romi, Syahrur dan Etik Umiyanti. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 7 (1), 1-7.

Rustariyuni, Surya Dewi, Aswitari, Luh Putu, Ratha, Putu Widi Suryawan dan Nina, Gek Ayu. (2018). Open Unemployment in The Province of Bali. *MIMBAR*. 34 (2), 473-485

Rustariyuni, Surya Dewi. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali Periode 2004 - 2012. *PIRAMIDA-Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Udayana, 10 (1), 45-55.

Santos, M.E., and Pablo Villatoro. (2018). A Multidimensional Poverty Index for Latin America. *Review of Income and Wealth*, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIES). Bahía Blanca, Argentina and Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, Chile, 64 (1), 52-82.

- Sarah Xue Dong and Chris Manning. (2017). Labour-Market Developments at a Time of Heightened Uncertainty. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. The Australian National University, 53 (1), 1–25.
- Senet, Putu Dyah Rahadi dan Ni Nyoman Yuliarmi. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 3 (6), 237-246.
- Seran, Sirilius. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor, 10 (2), 59-71.
- Sirait, Novlin dan A.A.I.N Marhaeni. (2013). Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2 (2), 108-118.
- Solihin, Achmad dan Ni Made Sukartini. (2014). Hubungan Upah dan Penawaran Tenaga Kerja Supir Taxi di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 7 (1), 60-72.
- Suadnyani, Ni Wayan Ria dan Ida Bagus Darsana. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7 (5), 1022-1049.
- Suartha, Nyoman dan I Gusti Wayan Murjana Yasa. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 10 (2), 95-107.
- Sucitrawati, Ni Putu dan Sudarsana Arka. (2013). Pengaruh Inflasi, Investasi, Dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2 (2), 51-62.
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suryadi Asep, Wenefrida Widyanti, Daniel Perwira dan Sudarno Sumarto. (2003). Minimum Wage Policy And Its Impact On Employment In The Urban Formal Sector. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39 (1): 29-50
- Utami, Tiani Wahyu, Abdul Rohman, Alan Prahutama. (2016). Pemodelan Regresi Berganda Dan Geographically Weighted Regression Pada Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah. *Media Statistika*. Universitas Muhammadiyah Semarang, 9 (2), 133-147.

- Wardiansyah, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi kasus Provinsi-Provinsi se-Sumatera). *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 5 (1), 13-18.
- Wijayanti, Ni Nyoman Setya Ari dan Ni Luh Karmini. (2014). Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 3 (10), 460-466.
- Yacoub, Yarlina. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak*, 8(3), Hal 176-185.
- Yoga Darma Putra, I Kadek dan Murjana Yasa. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMR Terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 7 (11), 2461-2489.
- Yunani, Tiya Kasanah, Anifatul Hanim, P. Edi Suswandi. 2018. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5 (1), 21-25.
- Zahroh, Sofiatuz Zahroh. (2017). Analisis Pengaruh PDRB, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 5 (2), 1-8.